

ANALISIS DISPARITAS PEREKONOMIAN ANTAR PULAU BESAR DI INDONESIA TAHUN 2013-2017

JULIO

Pan Budi Marwoto

Rizal R. Manullang

Management Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkal Pinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract- This Study is trying to aim the determine of economic disparity rate based on major Islands in Indonesia. The purpose of this research is to provide better data and understanding about Indonesian economic disparity The research was conducted by using an Economic Growth Analysis, Economic Contribution Analysis, measurement along with Absolute Comparison, Entrophy Thiel Disparity Index Method and Williamson Disparity Index Method. The results of economic growth analysis show that economic growth was climbing from all major island in Indonesia, Sulawesi had the most improvement in economic growth with 7,37 % average growth. The economic contribution analysis shows java has the most contribution with 57.96 % average contribution from other major islands. Absolute comparison shows there is an economic shift in the economic structure from just one island (Bali & Nusa Tenggara: from quadrant I to quadrant IV). The results of Williamson Method show the Economic Disparity relatively decreasing in all major islands except Java that covers all the decreasing from other major island. The Entrophy Thiel Index Method shows Economic Disparity relatively increasing in every major island except Java. This condition shows that Economic Disparity in Indonesia actually Worstened during 2013-2017.

Keywords : *Economic Disparity, Gross Domestic Product, Economic Growth, Economic Contribution, Absolute Comparison, Williamson Disparity Index, Entrophy Thiel Disparity Index.*

I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Salah satu indikator kualitas pertumbuhan adalah *Growth with Equity* atau pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Pertumbuhan perekonomian haruslah diikuti dengan pemerataan dan peningkatan kualitas perekonomian itu sendiri agar dapat membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia diharapkan tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. *Growth with Equity* atau Pertumbuhan Ekonomi berkeadilan adalah salah satu konsep yang digadang-gadang mampu mengantarkan Indonesia mencapai keberhasilan nasional di bidang ekonomi.

Indonesia dalam tahap-tahap awal pembangunan perekonomiannya menganut mashab *Trickle Down Effect* yang dikemukakan oleh Hirschman pada era tahun 1950-an, mashab ini banyak digunakan oleh negara berkembang. Mashab ini menyatakan bahwa pemusatan pembangunan ekonomi yang berpusat pada wilayah tertentu, akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di wilayah sekitarnya, yang artinya pembangunan yang dipusatkan pada pusat pemerintahan diharapkan akan membawa dampak positif serta dapat menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan efek menetes ke bawah (*Trickle Down Effect*). Sebab itu pembangunan Indonesia dipusatkan pada hanya pada Pulau Jawa, dengan harapan hasil pembangunan di Pulau Jawa dapat memberikan kontribusi kepada pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa sehingga perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan dapat mengalami peningkatan. Mashab pembangunan yang dikemukakan oleh Hirschman ini ternyata belum mampu membawa perekonomian Indonesia kearah yang diinginkan. Mashab *Trickle Down Effect* yang dicanangkan pemerintah pada masa orde baru masih belum menunjukkan kemajuan, sebaliknya Teori *Back Wash Effect* yang terlihat, dimana pendapatan yang diserap pemerintah pusat hanya berfokus untuk membangun pusat pemerintahan saja.

Pulau Jawa masih menjadi sentra perekonomian yang ditandai dengan kontribusi Pulau Jawa yang melebihi 50 % dari keseluruhan perekonomian Indonesia seperti yang tersaji dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1
Kontribusi Ekonomi Antar Pulau di Indonesia
Tahun 2013

NO	PULAU	2013
1	SUMATRA	23.05%
2	JAWA	57.06%
3	BALI & NUSA TENGGARA	2.80%
4	KALIMANTAN	9.25%
5	SULAWESI	5.50%
6	MALUKU	0.51%
7	PAPUA	1.83%

Sumber: Data BPS yang diolah

Tabel 1.1 diatas menunjukkan Kontribusi Ekonomi Antar Pulau Besar di Indonesia pada tahun 2013, misalnya Pulau

Jawa memiliki kontribusi 57.06 %, artinya perekonomian Pulau Jawa memiliki kontribusi 57.06 % terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan Pulau Sulawesi memiliki kontribusi ekonomi sebesar 5.50 %, artinya Pulau Sulawesi memiliki kontribusi sebesar 5.50 % terhadap perekonomian Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang masih belum memenuhi harapan itulah yang kemudian mengarahkan orientasi kebijakan ekonomi Indonesia kepada mashab *Growth with Equity*. Hal ini terlihat dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah UU No. 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sumber daya alam daerah akan diambil oleh pemerintah pusat, barulah kemudian didistribusikan kembali kepada daerah penghasil. Namun dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang, hal ini nampak dari banyak daerah penghasil sumber daya alam yang masih cukup tertinggal perekonomiannya.

Sejauh ini mashab *Growth with Equity* belum sepenuhnya bisa dibuktikan dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu Indonesia belum bisa melihat secara jelas apakah pembangunan ekonomi Indonesia sudah disertai dengan pemerataan dan kualitas pembangunan antar pulau besar di Indonesia. Ditambah lagi Penelitian mengenai pemerataan perekonomian dalam skala nasional juga masih minim dan kurangnya pembaharuan data mengenai tingkat pemerataan perekonomian yang terjadi di Indonesia.

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pulau-pulau besar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kontribusi ekonomi pulau-pulau besar terhadap Indonesia.
3. Untuk mengetahui perkembangan perbandingan absolut antar pulau besar di Indonesia.
4. Untuk mengetahui disparitas perekonomian antar pulau besar di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Disparitas Ekonomi

Masalah ketimpangan ekonomi antar pulau di Indonesia tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa melainkan juga antar kawasan barat dan kawasan timur negara Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar wilayah di Indonesia selama ini ternyata belum mencapai hasil yang diinginkan. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai tujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Myrdal (1957) juga mengungkapkan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang

menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyard, 1999).

Pengertian Kesenjangan

Kesenjangan diartikan sebagai suatu keadaan/kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, dimana terjadi ketidakadilan/ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang nyata dari segi finansial masyarakat mencakup kekayaan harta, kekayaan barang dan jasa dan lainnya.

Kesenjangan juga dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan terendah. Dalam konteks ekonomi Aspek "keadilan dan pemerataan" selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000). Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*)

Kriteria ini berarti semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.

2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*)

Kriteria ini berarti, apabila jumlah penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*)

3. Simetris

Kriteria ini berarti, jika antar penduduk bertukar, tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.

4. Sensitivitas transfer Pigou-Dalton

Kriteria ini berarti, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- Dapat didekomposisi

Sifat ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total Koefisien Gini dan Subkelompok masyarakat (*Subgroup*).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks anatr waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan Teknik *Bootstrap Interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

Saat membahas kesenjangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, hal ini menimbulkan konsep "Garis Kemiskinan" (*Absolute Poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, Pendidikan dan kesehatan lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Menurut Gatot Dwi Adiatmojo (2003) dalam "Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimal Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin" menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut H. Saberan (2002) produk domestik regional bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah produk domestik regional bruto merupakan gabungan dari empat kata yaitu:

1. Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa.
2. Domestik, artinya pembangunan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor-faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan.
3. Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan.
4. Bruto, artinya perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah diatas, maka arti PDRB adalah seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu.

PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pendapatan domestik regional bruto dan pengeluaran domestik regional bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran.

1. PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu: upah/gaji,sewa tanah,dan keuntungan usaha.
2. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga,pemerintah maupun lembaga (Non Profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan modal bruto, selisih ekspor dan selisih persediaan barang (stok), (BPS, Pendapatan Regional Kabupaten Biora Tahun 2003)

Tahun dasar adalah tahun dimana nilai-nilai agregatnya dijadikan sebagai acuan untuk menghitung nilai-nilai agregat

konstan tahun-tahun berikutnya. Tujuan dari sistem penyajian yang dibedakan atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk) adalah untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai agregat baik secara nominal maupun secara riil dibandingkan terhadap keadaan pada tahun dasar.

Terminologi harga berlaku dan harga konstan merupakan sistem penyajian tabel-tabel statistik PDRB. Penyajian atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa agregat-agregat dinilai terhadap harga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan penyajian atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa agregat-agregat dinilai terhadap harga pada tahun dasar (BPS, Pendapatan Regional Kabupaten Biora Tahun 2003).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Menurut Hicks dalam kutipan Azulaidin (2003), menarik kesimpulan dari perbedaan yang umum terdapat dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan. Pendapat tersebut diperjelas dengan mengatakan bahwa perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara-negara dengan ekonomi yang terbelakang, sedangkan pertumbuhan lebih mengacu pada masalah di negara-negara maju.

Teori Schumpeter (1934) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah negara maju.

Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur

dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sukirno, 2002).

Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu "ceritera" logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal, yaitu (1) mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan (2) mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Sampai sekarang tidak ada suatu teori pertumbuhan yang bersifat menyeluruh dan lengkap dan merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Para ahli ekonomi mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai pertumbuhan ekonomi. Pandangan para ahli tersebut sering dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka hidup dan oleh ideologi yang mereka anut.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kekayaan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tujuan utama dari pembangunan suatu negara atau wilayah. Menurut Soubbotina dan Sheram (2000) dalam Bhinadi (2003) tentang pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan kekayaan suatu negara juga berpotensi untuk menurunkan kemiskinan dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Meskipun sejarah juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kadang-kadang tidak diikuti oleh kemajuan di dalam pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara atau wilayah yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Studi mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian menjadi penting untuk memahami mengapa suatu wilayah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Secara aritmatika, sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja, dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Perubahan produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan antar wilayah. Sedangkan yang mempengaruhi produktivitas itu sendiri adalah kemajuan teknologi (World Bank, 1991).

Pengukuran Disparitas

Indikator yang dapat menunjukkan perubahan atau peningkatan di bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari perubahan besaran Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun ini maka didapatlah angka pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan perekonomian. Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Beberapa diantaranya adalah

menggunakan Teori Perbandingan Absolut, Indeks Williamson dan Indeks Theil.

1. Teori Perbandingan Absolut Antar Daerah

Teori yang menjelaskan tentang perbandingan absolut antar daerah melalui pendekatan Tipologi Klassen (*Klassen Typology*). Pendekatan Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap wilayah (Bank Indonesia, 2006). Pendekatan Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan per kapita daerah. Pendekatan ini akan menghasilkan karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu:

- Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)
- Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*)
- Daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*)
- Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

2. Indeks Williamson

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antardaerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi: 1997).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitiktolak dari kenyataan itu, Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan/ ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) endominasi

pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyard, 1999).

3. Indeks Entropy Theil

Theil's Coefficient of Concentration telah menjadi indeks yang sangat populer untuk menganalisa distribusi spasial dan memiliki keunggulan dibanding dengan indeks kesenjangan lainnya. Indeks Theil merupakan suatu analisa statis yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dengan menggunakan ukuran entropi dari ketidak-merataan (Etharina, 2005). Koefisien Theil dapat diinterpretasikan sebagai logaritma dari rata-rata geometri tertimbang dari pendapatan per kapita regional yang dideflasikan dengan rata-rata pendapatan per kapita nasional.

Lebih lanjut Wibisono (2003) menyatakan bahwa untuk pendapatan per kapita yang merata sempurna, indeks Theil diberikan bobot nilai nol dan peningkatan indeks entropy menunjukkan peningkatan disparitas. Indeks Theil mempunyai beberapa keunggulan yaitu: Pertama, sifatnya yang tidak sensitif terhadap skala daerah dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Kedua, indeks Theil independen terhadap jumlah daerah-daerah sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan disparitas dari sistem regional yang berbeda-beda. Ketiga, indeks Theil dapat didekomposisikan ke dalam indeks ketidakmerataan antar dan intra kelompok daerah menjadi disparitas *between* dan disparitas *within* wilayah kelompok atau grup secara simultan.

Menurut Wibisono (2003) dalam studi empirisnya menemukan bahwa karena sifatnya yang bisa didekomposisi maka Indeks Theil memberikan tambahan informasi bahwa kesenjangan dalam pendapatan per kapita regional lebih banyak diserap oleh kesenjangan di dalam kelompok wilayah (*within inequality*) daripada kesenjangan antar kelompok wilayah (*between inequality*).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisa data. Variabel – variabel yang akan dipergunakan adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah:

- PDRB masing-masing Pulau tahun ke t
- PDRB masing-masing Pulau tahun ke t-1

2. Kontribusi Ekonomi

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah:

- PDRB masing-masing Pulau atas dasar harga berlaku
- Total PDRB antar Pulau di Indonesia

3. Perbandingan Absolut Antar Pulau Besar (Klasen)

Variabel yang digunakan dalam metode ini adalah:

- Rata-rata PDRB per kapita di Indonesia
- Rata-rata PDRB per kapita di antar Pulau di Indonesia

- Jumlah penduduk masing-masing Pulau Besar di Indonesia
 - Jumlah penduduk Indonesia
- #### 4. Indeks Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar di Indonesia

Variabel yang digunakan dalam metode ini adalah:

- PDRB per kapita antar Pulau di Indonesia
- PDRB masing-masing Pulau atas dasar harga berlaku
- Jumlah penduduk masing-masing Pulau Besar di Indonesia

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisa data. Variabel – variabel yang akan dipergunakan adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah:

- PDRB masing-masing Pulau tahun ke t
- PDRB masing-masing Pulau tahun ke t-1

2. Kontribusi Ekonomi

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah:

- PDRB masing-masing Pulau atas dasar harga berlaku
- Total PDRB antar Pulau di Indonesia

3. Perbandingan Absolut Antar Pulau Besar (Klasen)

Variabel yang digunakan dalam metode ini adalah:

- Rata-rata PDRB per kapita di Indonesia
- Rata-rata PDRB per kapita di antar Pulau di Indonesia
- Jumlah penduduk masing-masing Pulau Besar di Indonesia
- Jumlah penduduk Indonesia

4. Indeks Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar di Indonesia

Variabel yang digunakan dalam metode ini adalah:

- PDRB per kapita antar Pulau di Indonesia
- PDRB masing-masing Pulau atas dasar harga berlaku
- Jumlah penduduk masing-masing Pulau Besar di Indonesia

Data yang Diperlukan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan, antara lain data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan digunakan dalam perhitungan. Data yang diperlukan adalah:

- Data PDRB Menurut Provinsi atas dasar Harga Berlaku Indonesia tahun 2013-2017
- Data PDRB Menurut Provinsi atas dasar Harga Konstan 2010 Indonesia tahun 2013-2017
- Data PDRB Per Kapita Menurut Provinsi atas dasar Harga Berlaku Indonesia Tahun 2013-2017
- Data PDRB Per Kapita Menurut Provinsi atas dasar Harga Konstan 2010 Indonesia Tahun 2013-2017
- Data jumlah penduduk seluruh provinsi Indonesia tahun 2013-2017

Metode Analisis

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menentukan berapa besar pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi, sehingga dapat diketahui provinsi yang memiliki pertumbuhan yang besar, sedang, dan rendah.

Rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Ekonomi

Perhitungan kontribusi digunakan untuk menganalisa dan menentukan kontribusi masing-masing provinsi, sehingga dapat diketahui provinsi yang memiliki kontribusi terbesar sampai dengan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan kontribusi ekonomi provinsi terhadap PDRB Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

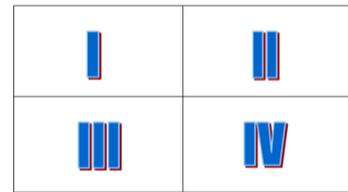
$$\text{Kontribusi Ekonomi} = \frac{\text{PDRB Provinsi}}{\text{PDRB total Indonesia}} \times 100\%$$

3. Perbandingan Absolut Antar Pulau Besar (Klasen)

Perbandingan absolut antar daerah disajikan dalam bentuk diagram empat kuadran, sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Bagian tengah antara sumbu vertikal dan horizontal terdapat garis tegak lurus. Posisi masing-masing daerah pada salah satu kuadran tergantung kepada nilainya jika dibandingkan nilai rata-rata provinsi-provinsi di Indonesia untuk PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan.

- Kuadran I : ditempati oleh pulau-pulau dengan nilai PDRB perkapita lebih rendah tetapi tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.
- Kuadran II : ditempati oleh pulau-pulau dengan nilai PDRB per kapita lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.
- Kuadran III : ditempati oleh pulau-pulau dengan PDRB per kapita tinggi tetapi tingkat pertumbuhan lebih rendah.
- Kuadran IV : ditempati oleh pulau-pulau dengan PDRB per kapita lebih rendah dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah.

Grafik 1
Kuadran Perbandingan Absolut



Apabila diagram empat kuadran ini disajikan secara rutin dan berkala, maka akan diperoleh gambaran perubahan lokasi masing-masing daerah dalam diagram yang sekaligus menunjukkan dinamika pembangunan antar pulau. Misalnya suatu pulau besar berubah posisinya dari kuadran III langsung beranjak ke kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut telah mencapai kemajuan relatif tinggi dibandingkan pulau besar lain dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini bukan tidak mungkin karena perubahan posisi dalam era ekonomi yang menunjukkan dinamika kemampuan sebuah pulau dalam hal membangun perekonomiannya.

4. Indeks Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar di Indonesia

Pengukuran indeks disparitas didasarkan kepada keragaman yang terjadi pada hasil-hasil pembangunan ekonomi antar pulau, dalam hal ini komponen yang dihitung berupa besaran PDRB per kapita dan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita. Nilainya menunjukkan kondisi kesenjangan antar pulau yang disebabkan oleh dua indikator tersebut. Kriteria pengukurannya adalah semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin besar pula kesenjangan antar pulau besar di Indonesia. Sebaliknya, semakin kecil nilai indikator ini menunjukkan pemerataan antar wilayah semakin baik.

Untuk menghitung indeks disparitas digunakan dua metode, yaitu Koefisien Variasi Tertimbang yang dikemukakan oleh Wiliamson. Rumus yang digunakan adalah:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{37} (y_i - \bar{y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{y}}$$

- Keterangan :
- V_w : koefisien variasi tertimbang
 - \bar{y} : rata-rata PDRB per kapita di Indonesia
 - Y_i : rata-rata PDRB di pulau i
 - $\frac{n_i}{n}$: proporsi jumlah penduduk pulau ke-I terhadap jumlah penduduk Indonesia.

Kedua menggunakan Indeks Entropy Thiel. Rumus yang digunakan adalah:

$$I(y) = \sum_{r=1}^R Y_r \log \frac{Y_r}{N_r / N} + \sum_{r=1}^R Y_r \left[\sum_{i \in r} \frac{y_i}{Y_r} \log \frac{y_i / Y_r}{N_r} \right]$$

- Keterangan :
- $I(y)$: indeks entropi;

- Y_i : pangsa pulau besar terhadap total PDRB Indonesia;
- N : jumlah keseluruhan pulau besar
- Y_r : pangsa seluruh pulau besar di Indonesia;
- N_r : jumlah pulau besar di negara r; dan
- R : jumlah pulau.

IV. PEMBAHASAN

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi **Anali**

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau Besar di Indonesia Tahun 2013-2017

NO	PULAU	2013	2014	2015	2016	2017
1	SUMATRA	2,214,135	2,458,866	2,584,135	2,787,833	2,994,517
2	JAWA	5,481,143	6,130,142	6,797,269	7,408,390	8,086,316
	BALI & NUSA					
3	TENGGARA	269,352	306,517	358,199	395,094	430,448
4	KALIMANTAN	888,193	936,816	950,601	995,134	1,133,148
5	SULAWESI	528,194	602,222	688,304	765,052	844,970
6	MALUKU	49,273	55,698	60,984	66,211	72,758
7	PAPUA	175,855	191,511	213,195	242,183	263,404
	Total PDRB Indonesia	9,606,145	10,681,772	11,652,687	12,659,897	13,825,561

Sumber: Data BPS yang diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan oleh basis sumber pendapatan pulau-pulau ini yang masih mengandalkan sumber daya alam, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan pulau-pulau ini, sehingga pendapatan pulau-pulau ini sangat tergantung pada harga komoditas sumber daya alam di pasar dunia.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa cenderung meningkat selama periode tahun 2013 s/d 2017, hal ini disebabkan oleh basis pendapatan Pulau Jawa yang merupakan sektor industri, dimana kebutuhan akan produk hasil industri tersebut semakin meningkat setiap tahunnya dengan meningkatnya jumlah penduduk, ditambah lagi sektor ini tidak terlalu bergantung pada harga pasar dunia, sehingga dapat semakin berkembang selama periode tahun 2013 s/d 2017.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Bali dan Nusa Tenggara cenderung mengalami tingkat fluktuasi yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari lonjakan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang melonjak menjadi 10,42 % dari tahun sebelumnya yang hanya 5,90 %. Kenaikan yang sangat tinggi ini disebabkan meningkatnya sektor pertambangan di Nusa Tenggara tahun 2015 sebanyak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan sebesar 10,42 persen di tahun 2015.

2. Analisis Kontribusi Ekonomi

Tabel 3

Kontribusi Ekonomi Antar Pulau Besar di Indonesia Tahun 2013-2017

NO	PULAU	2013	2014	2015	2016	2017	Rataan
1	SUMATRA	23.05%	23.02%	22.18%	22.02%	21.66%	22.38%
2	JAWA	57.06%	57.39%	58.33%	58.52%	58.49%	57.96%
	BALI & NUSA						
3	TENGGARA	2.80%	2.87%	3.07%	3.12%	3.11%	3.00%
4	KALIMANTAN	9.25%	8.77%	8.16%	7.86%	8.20%	8.45%
5	SULAWESI	5.50%	5.64%	5.91%	6.04%	6.11%	5.84%
6	MALUKU	0.51%	0.52%	0.52%	0.52%	0.53%	0.52%
7	PAPUA	1.83%	1.79%	1.83%	1.91%	1.91%	1.85%

Sumber: Data BPS yang diolah

Berdasarkan tabel 5.6 di atas pulau-pulau besar di Indonesia memiliki Kontribusi yang cenderung tetap dalam rentang waktu 5 tahun. Pulau Jawa menyumbang kontribusi terbesar, yaitu rata-rata 57,96 % dari total PDRB Indonesia dan penyumbang kontribusi terendah adalah Pulau Maluku dengan rata-rata kontribusi 0,52 %.

Kesenjangan terlihat sangat jelas dari data ini, salah satu penyebabnya adalah pemusatan penduduk yang hanya berpusat di pulau Jawa saja, rata-rata 56,82 % penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, dengan keberpusatan ekonomi di Pulau Jawa, menyebabkan pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Pulau Jawa, sehingga kurang memperhatikan pulau-pulau besar lain di Indonesia, seperti terlihat pada kontribusi pulau-pulau besar Non-Jawa yang cenderung tetap kontribusi ekonominya, bahkan dua pulau besar yang memiliki kontribusi ekonomi dibawah Pulau Jawa cenderung menurun kontribusi ekonominya selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan Teori Trickle Down Effect yang dicanangkan pemerintah gagal. Data kontribusi ekonomi diatas tidak hanya menunjukkan kegagalan Teori Trickle Down Effect yang dianut oleh pemerintah Indonesia, namun juga menunjukkan Teori sebaliknya yang terjadi, yaitu Teori Backwash Effect sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arsyad,1999).

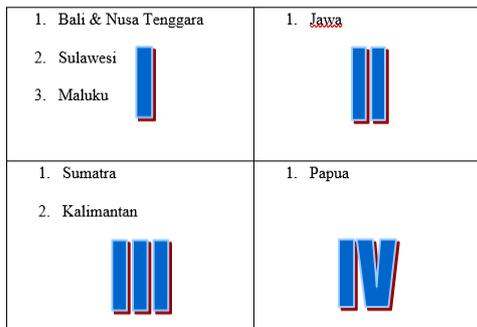
Hal ini terlihat dari kontribusi Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan yang menjadi penyumbang PDRB terbesar setelah Pulau Jawa justru mengalami penurunan kontribusi selama periode tahun 2013-2017. Pemusatan pembangunan pada pulau Jawa yang diharapkan menetes ke pulau-pulau besar lainnya masih belum menunjukkan hasil yang konkret, sebaliknya malah keberpusatan ini semakin mendorong adanya kesenjangan antar pulau besar yang ada di Indonesia. Pembahasan ini menunjukkan bahwa kesenjangan perekonomian di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti selama periode tahun 2013 s/d 2017.

3. Analisis Disparitas Perekonomian antar Pulau Besar di Indonesia

- Perbandingan Absolut Antar Pulau Besar di Indonesia

Grafik 2 berikut akan menggambarkan letak masing-masing pulau dalam 4 kuadran yang ada pada tahun 2014.

Grafik 2
Kuadran Tipologi Klasen Tahun 2014



Sumber: Data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik 2 diatas, terdapat 3 pulau besar yang termasuk ke dalam Kuadran I yaitu Bali & Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Ketiga pulau ini perlu meningkatkan PDRB Per Kapitanya supaya dapat beralih ke kuadran II yang merupakan Kuadran dengan PDRB Per Kapita dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

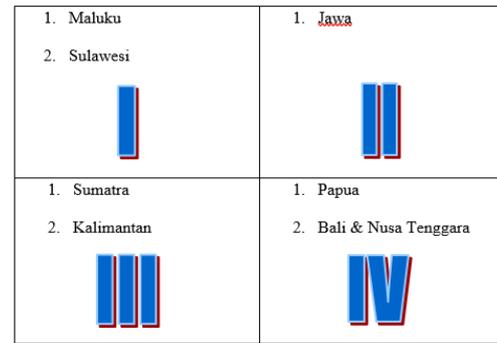
Kuadran II yang merupakan kuadran dengan PDRB Per Kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kuadran ini adalah kuadran yang paling baik dari 4 kuadran yang ada, dimana suatu wilayah yang masuk ke dalam kuadran ini dikategorikan sebagai wilayah yang maju, namun hanya berisi Pulau Jawa saja, dimana hal ini kembali memperkuat indikasi pemusatan ekonomi pada Pulau Jawa dan terjadi disparitas pada perekonomian Indonesia.

Pulau Sumatra dan Kalimantan termasuk ke dalam Kuadran III, dimana artinya kedua pulau ini memiliki PDRB Per Kapita yang sudah diatas rata-rata nasional, namun tingkat pertumbuhannya belum melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pulau Sumatra dan Kalimantan perlu meningkatkan tingkat pertumbuhannya agar dapat bergerak ke kuadran yang lebih baik.

Papua masuk ke dalam kuadran IV, dimana kuadran ini menunjukkan wilayah dengan PDRB Per Kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini mengindikasikan Pulau Papua masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pulau ini mengingat bahwa pulau ini masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Grafik 3 berikut menggambarkan letak masing-masing pulau dalam 4 kuadran yang ada pada tahun 2017.

Grafik 3
Kuadran Tipologi Klasen Tahun 2017



Sumber: Data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik 3 diatas, pada tahun 2017 hanya terdapat 2 pulau yang termasuk ke dalam Kuadran I yaitu Maluku dan Sulawesi. Kedua pulau ini perlu meningkatkan PDRB nya supaya dapat beralih ke kuadran II yang merupakan Kuadran dengan PDRB Per Kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kuadran II yang merupakan kuadran dengan PDRB dan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pada tahun 2017 hanya terdiri dari pulau Jawa. Hal ini kembali memperkuat indikasi pemusatan ekonomi pada Pulau Jawa saja.

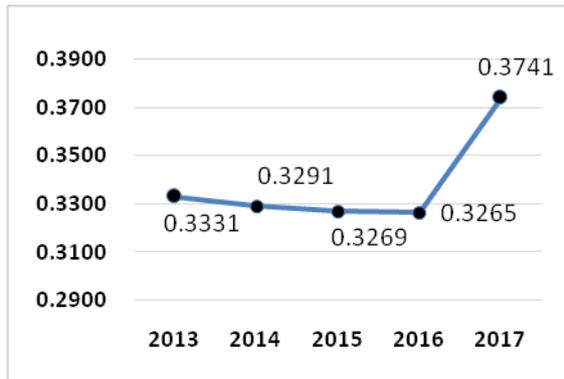
Pulau Sumatra dan Kalimantan tahun 2017 masih termasuk ke dalam Kuadran III, dimana artinya kedua pulau ini belum banyak berkembang semenjak tahun 2013.

Bali & Nusa Tenggara dan Papua pada tahun 2017 masuk ke dalam kuadran IV, hal ini mengindikasikan kedua pulau ini masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

Berdasarkan dua kuadran diatas, perbandingan absolut antar pulau besar di Indonesia tahun 2013 dan 2017 menunjukkan adanya perpindahan kuadran. Perpindahan terjadi pada Pulau Bali & Nusa Tenggara dari kuadran I ke kuadran IV, hal ini menunjukkan penurunan pada perekonomian Pulau Bali & Nusa Tenggara. Sedangkan pulau-pulau lain masih stagnan di kuadran yang sama. Perpindahan ini disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi Pulau Bali & Nusa Tenggara secara keseluruhan.

- Analisis Disparitas Williamson

Grafik 4
Indeks Disparitas Williamson Indonesia Tahun 2013-2017



Sumber: Data BPS yang diolah

Berdasarkan grafik 4 diatas, diketahui bahwa Indeks Disparitas (Williamson) Indonesia tahun 2013 senilai 0,3331, tahun 2014 senilai 0,3291, tahun 2015 senilai 0,3269, tahun 2016 senilai 0,3265, dan tahun 2017 senilai 0,3741. Tren indeks disparitas antar pulau Indonesia menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik dari tahun 2013-2016, namun mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2017, bahkan melewati tingkat disparitas perekonomian pada tahun 2013 hanya dalam satu tahun saja. Hal ini menunjukkan disparitas selama periode penelitian tahun 2013-2017 semakin memburuk. Terlepas dari kecenderungan penurunan pada semua pulau besar kecuali, Pulau Jawa, dorongan peningkatan disparitas pada tahun 2017 di Pulau Jawa, mampu mendorong disparitas Indonesia lebih buruk dari tahun 2017.

Disparitas antara pulau-pulau besar di Indonesia berdasarkan analisis terhadap pendapatan pulau-pulau besar di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang terjadi akibat ketidakmerataan perekonomian yang hanya bertumpu pada beberapa pulau besar saja serta kebijakan pemerintah yang belum bisa menyeimbangkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Tingkat pembangunan perekonomian yang rendah di beberapa pulau besar menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai macam bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin tinggi.

• Analisis Entrophy Thiel

Hasil analisis Entrophy antar pulau-pulau besar di Indonesia tersaji dalam tabel 5.7 di berikut ini:

Tabel 4
Indeks Entrophy Thiel Antar Pulau Besar di Indonesia Tahun 2013-2017

NO	PI	2013	2014	2015	2016	2017
1	SUMATRA	0.1469	0.1515	0.1534	0.1559	0.1578
2	JAWA	0.1390	0.1245	0.1063	0.0870	0.0630
3	BALI & NUSA TENGGERA	0.0435	0.0477	0.0533	0.0570	0.0604
4	KALIMANTAN	0.0956	0.0986	0.0994	0.1020	0.1095
5	SULAWESI	0.0693	0.0754	0.0820	0.0875	0.0929
6	MALUKU	0.0117	0.0130	0.0139	0.0149	0.0161
7	PAPUA	0.0318	0.0339	0.0367	0.0403	0.0428

Sumber: Data BPS yang diolah

Secara keseluruhan Indeks Entrophy Indonesia cenderung meningkat selama periode tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat disparitas perekonomian antar pulau besar di Indonesia selama periode tahun 2013-2017. Hanya Pulau Jawa yang mengalami penurunan tingkat disparitas dari semua pulau besar yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi keberpusatan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa. Hasil analisis ini kembali memperkuat analisis-analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa ada disparitas perekonomian di Indonesia.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, bagaimana disparitas perekonomian antar pulau besar di Indonesia, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2013-2017 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra pada tahun 2014 sebesar 4.60 %, tahun 2015 sebesar 3.53 %, tahun 2016 sebesar 4.29 %, dan tahun 2017 sebesar 4.30 %. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2014 sebesar 5.57 %, tahun 2015 sebesar 5.48 %, tahun 2016 sebesar 5.60 %, dan tahun 2017 sebesar 5.61 %. Pertumbuhan ekonomi Pulau Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2014 sebesar 5.90 %, tahun 2015 sebesar 10.42 %, tahun 2016 sebesar 5.92 %, dan tahun 2017 sebesar 3.73 %. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada tahun 2014 sebesar 3.37 %, tahun 2015 sebesar 1.38 %, tahun 2016 sebesar 2.02%, dan tahun 2017 sebesar 4.33 %. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi pada tahun 2014 sebesar 6.87%, tahun 2015 sebesar 8.19 %, tahun 2016 sebesar 7.43 %, dan tahun 2017 sebesar 6.99 %. Pertumbuhan ekonomi Pulau Maluku pada tahun 2014 sebesar 6.12 %, tahun 2015 sebesar 5.76 %, tahun 2016 sebesar 5.75 %, dan tahun 2017 sebesar 6.65 %. Pertumbuhan ekonomi Pulau Papua pada tahun 2014 sebesar 4.15 %, tahun 2015 sebesar 6.41 %, tahun 2016 sebesar 7.81 %, dan tahun 2017 sebesar 4.47 %. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan, namun Pertumbuhan ekonomi antar Pulau Besar di Indonesia memiliki kesenjangan yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu Pulau Bali & Nusa Tenggara sebesar 10,42 % pada tahun 2015 dan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah adalah Pulau Kalimantan sebesar 1,38 % pada tahun 2015.

2. Kontribusi ekonomi Pulau Sumatra tahun 2013 sebesar 23.05 %, tahun 2014 sebesar 23.02 %, tahun 2015 22.18 %, tahun 2016 sebesar 21.66 % dan tahun 2017 sebesar 22.38 %. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa tahun 2013 sebesar 57.06 %, tahun 2014 sebesar 57.39 %, tahun 2015 58.33 %, tahun 2016 sebesar 58.49 % dan tahun 2017 sebesar 58.49 %. Kontribusi ekonomi Pulau Bali & Nusa Tenggara tahun 2013 sebesar 2.80 %, tahun 2014 sebesar 2.87%, tahun 2015 3.07 %, tahun 2016 sebesar 3.12 % dan tahun 2017 sebesar 3.11%. Kontribusi ekonomi Pulau Kalimantan tahun 2013 sebesar 9.25 %, tahun 2014 sebesar 8.77 %, tahun 2015 8.16 %, tahun 2016 sebesar 7.86 % dan tahun 2017 sebesar 8.20 %. Kontribusi ekonomi Pulau Sulawesi tahun 2013 sebesar 5.50 %, tahun 2014 sebesar 5.64 %, tahun 2015 5.91 %, tahun 2016 sebesar 6.04 % dan tahun 2017 sebesar 6.11 %. Kontribusi ekonomi Pulau Maluku tahun 2013 sebesar 0.51 %, tahun 2014 sebesar 0.52 %, tahun 2015 0.52 %, tahun 2016 sebesar 0.52 % dan tahun 2017 sebesar 0.53 %. Kontribusi ekonomi Pulau Papua tahun 2013 sebesar 1.83 %, tahun 2014 sebesar 1.79 %, tahun 2015 1.83 %, tahun 2016 sebesar 1.91 % dan tahun 2017 sebesar 1.91 %. Kontribusi Ekonomi Antar Pulau Besar di Indonesia memiliki kesenjangan yang sangat tinggi, dimana Pulau Jawa memiliki kontribusi tertinggi dengan 58,52 % dan Pulau Maluku memiliki kontribusi terendah, yaitu 0,51 % dari perekonomian Indonesia. Hal ini membuktikan adanya disparitas perekonomian dan belum membuktikan adanya pembangunan antar Pulau Besar di Indonesia.
3. Perbandingan absolut antar pulau besar di Indonesia menunjukkan adanya perpindahan kuadran antara tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 2014 kuadran I ditempati oleh Pulau Bali & Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, Kuadran II ditempati oleh Pulau Jawa, Kuadran III ditempati oleh Pulau Sumatra dan Kalimantan dan Kuadran IV ditempati oleh Pulau Papua. Pada tahun 2017 Kuadran I ditempati oleh Pulau Sulawesi dan Maluku, Kuadran II ditempati oleh Pulau Jawa, Kuadran III ditempati oleh Pulau Sumatra dan Kalimantan dan Kuadran IV ditempati oleh Pulau Bali & Nusa Tenggara dan Papua. Pulau Bali & Nusa Tenggara berpindah dari kuadran I menjadi kuadran IV pada tahun 2017. Perpindahan ini mengarah kearah yang lebih buruk, sedangkan pulau lain masih tetap berada pada kuadran yang sama, sehingga secara keseluruhan perekonomian pulau-pulau besar di Indonesia masih stagnan.
4. Disparitas ekonomi antar pulau di Indonesia tidak tinggi, meskipun demikian secara keseluruhan kesenjangan ini semakin buruk. Indeks Disparitas (Williamson) Indonesia tahun 2013 senilai 0,3331, tahun 2014 senilai 0,3291, tahun 2015 senilai 0,3269, tahun 2016 senilai 0,3265, dan tahun 2017 senilai 0,3741. Indeks disparitas cenderung meningkat selama periode 2013-2017 yang ditunjukkan oleh nilai indeks disparitas 0,3331 pada tahun 2013 sampai dengan 0,3741 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang cenderung meningkat sehingga menunjukkan kurangnya pemerataan ekonomi dan adanya disparitas perekonomian antar Pulau besar di Indonesia. Indeks Entropy Pulau Sumatra tahun 2013 sebesar 0.1469, tahun 2014 sebesar 0.1515, tahun 2015 sebesar 0.1534, tahun 2016 sebesar 0.1559, dan tahun 2017 sebesar 0.1578. Indeks Entropy Pulau Jawa tahun

2013 sebesar 0.1390, tahun 2014 sebesar 0.1245. tahun 2015 sebesar 0.1063, tahun 2016 sebesar 0.0870, dan tahun 2017 sebesar 0.0630. Indeks Entropy Pulau Bali & Nusa Tenggara tahun 2013 sebesar 0.0435, tahun 2014 sebesar 0.0477 tahun 2015 sebesar 0.0533, tahun 2016 sebesar 0.0570, dan tahun 2017 sebesar 0.0604. Indeks Entropy Pulau Kalimantan tahun 2013 sebesar 0.0956, tahun 2014 sebesar 0.0986. tahun 2015 sebesar 0.0994, tahun 2016 sebesar 0.1020, dan tahun 2017 sebesar 0.1095. Indeks Entropy Pulau Sulawesi tahun 2013 sebesar 0.0693, tahun 2014 sebesar 0.0754. tahun 2015 sebesar 0.0820, tahun 2016 sebesar 0.0875, dan tahun 2017 sebesar 0.0929. Indeks Entropy Pulau Maluku tahun 2013 sebesar 0.0117, tahun 2014 sebesar 0.0130. tahun 2015 sebesar 0.0139, tahun 2016 sebesar 0.0149, dan tahun 2017 sebesar 0.0161. Indeks Entropy Pulau Papua tahun 2013 sebesar 0.0318, tahun 2014 sebesar 0.0339. tahun 2015 sebesar 0.0367, tahun 2016 sebesar 0.0403, dan tahun 2017 sebesar 0.0428. Hasil Indeks Entropy menunjukkan disparitas antar pulau di Indonesia semakin meningkat di semua pulau besar kecuali Pulau Jawa yang mengindikasikan pemusatan pembangunan perekonomian di Pulau Jawa.

Saran

Beberapa saran berikut ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi di masa yang akan datang :

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan kontribusi ekonomi antar pulau besar di Indonesia tidak merata sehingga timbul disparitas perekonomian. Hal ini berbanding terbalik dengan teori ekonomi "Trickle Down Effect" dimana harusnya pulau-pulau di luar Jawa harusnya ikut mengalami perkembangan yang signifikan seperti pulau Jawa. Hal yang dapat dilakukan oleh Pulau yang memiliki tumpuan pada sektor – sektor perekonomian yang bergantung pada alam seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua adalah dapat lebih berani mengalihkan sektor perekonomian utama kearah sektor yang lebih stabil seperti sektor Pariwisata, misalnya Pulau Maluku, Sulawesi yang sudah mulai terkenal dengan wisata yang ada di Pulau tersebut. Kita dapat mencontoh negara Thailand, yang awalnya juga mengandalkan pertambangan, namun mampu mengembangkan pariwisatanya sampai seperti sekarang, Pemerintah Thailand memiliki komitmen dan membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam mengembangkan pariwisatanya. Pulau Papua dan Kalimantan dapat lebih mengarahkan alokasi APBD untuk industrialisasi, mengingat sumber daya alam yang sudah ada, sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan harga jual dari hasil bumi tersebut, dalam hal ini kita bisa mencontoh negara China. Industri di China berkembang dengan pesat karena 1 faktor kunci, yaitu UMKM, oleh karena itu UMKM perlu lebih dikembangkan untuk peningkatan perekonomian. Pulau yang mengandalkan Sektor campuran seperti Sumatra dan Bali & Nusa Tenggara, dapat meningkatkan Sektor yang paling potensial, Bali & Nusa Tenggara disarankan meningkatkan pariwisata, sedangkan Sumatra lebih disarankan meningkatkan sektor industri mengingat potensi yang ada di masing-masing pulau.

2. Berdasarkan hasil Analisis Perbandingan Absolut, masih banyak Pulau Maluku dan Papua termasuk ke dalam Kuadran IV atau daerah tertinggal, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada kedua pulau ini, sehingga dapat mengejar ketinggalan dari Pulau Besar lainnya. Sama sekali tidak ada perbaikan kuadran dari tahun 2014-2017, bahkan ada penurunan pada pulau Bali & Nusa Tenggara dari kuadran I ke kuadran IV, hal ini mengindikasikan penurunan perekonomian antar Pulau di Indonesia. Pulau-Pulau yang berada pada kuadran IV rata-rata bergantung pada sektor sumber daya alam dan merupakan Kawasan Indonesia Timur.
 3. Untuk mengurangi disparitas perekonomian antar daerah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya:
 - Perlu adanya pemetaan wilayah untuk mengetahui pulau yang masih tertinggal dan pulau sudah mandiri perekonomiannya agar dapat di hasilkan kebijakan yang tepat.
 - membuka forum diskusi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pejabat, pengamat, praktisi, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat dengan tujuan menjaring masukan, ide, dan solusi dari permasalahan kesenjangan perekonomian di Indonesia.
 - Konektivitas dan aksesibilitas antar pulau di Indonesia perlu ditingkatkan, sehingga mempermudah laju pergerakan roda ekonomi antar pulau di Indonesia yang pada akhirnya akan mengurangi disparitas perekonomian.
 - Pemerintah dapat lebih berfokus pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan regional khususnya di luar Jawa, langkah ini merupakan strategi penting untuk menanggulangi disparitas antar pulau yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan regional.
 - Pemerintah dapat membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Apabila berhasil terimplementasikan dengan baik, kebijakan ini akan memberikan efek domino pada keberhasilan kebijakan lain, misalnya, memperbaiki dan meningkatkan sistem logistik nasional dan praktik ekonomi digital serta meningkatkan layanan dasar dan publik berbasis digital atau internet ke seluruh wilayah.
 - Pemerintah diharapkan memiliki komitmen dan konsistensi yang bersifat jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat, mengingat Keseluruhan permasalahan kesenjangan antarwilayah yang telah dibahas menunjukkan permasalahan ini bersifat kompleks, multidimensi, dan multisektoral sehingga tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang pendek.
- Regional Planning, University of Pennsylvania Philadelphia, USA (tidak dipublikasikan)”
- 2] Myrdal, G. 1957. “Economic Theory and Underdevelopment Regions”.London.
 - 3] Arsyad, Lincoln. 1999 “Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah”. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
 - 4] Mahi, Raksaka. 2000. “Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Eksistensi”. CSIS: Jakarta..
 - 5] Adiatmojo, Dwi Gatot. 2003. “Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin”. Jakarta.
 - 6] Saberhan, H. 2002. Produk Domestik Regional Bruto. Rajawali: Jakarta.
 - 7] Azulaidin. 2003. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpanganantar Wilayah Pembangunan di Sumatra Utara, Thesis S.2”. MIESP USU (tidak dipublikasikan).
 - 8] Schumpeter, J. 1934. “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and Business Cycle ”. Harvard University.
 - 9] Tarigan, R. 2004. “Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi”. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
 - 10] Sukirno, Sadono. 2002. “Ekonomi Pembangunan”. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
 - 11] Michael P. Todaro, 2000. Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga, edisi ketujuh, Erlangga Jakarta
 - 12] Bhinadi, Ardito. 2003. “Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”: Yogyakarta.
 - 13] World Bank. 1991. “World Development Report, The Challenge of Development”. Oxford University Press: Oxford.
 - 14] Williamson, J.G. 1965. “Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns”. Economic Development and Cultural Change.
 - 15] Etharina. “Disparitas Pendapatan antar Daerah di Indonesia”. Jurnal Kebijakan Ekonomi, Agustus 2005, I (1), hal.59-74.
 - 16] Wibisono, Yusuf. “Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, januari 2003, Vol.51, hal.53-82.

DAFTAR PUSTAKA

- 1] Ardani, Amirudin. 1992, “Analysis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis of The Project on Indonesia Development”,Ph.D. Dissertation City and